

Beredar Hasil Pileg 2024 DPRD Kota Depok, Bawaslu: Belum Final!

DEPOK (IM) - Ketua Bawaslu Kota Depok, Fathul Arif angkat bicara terkait isu yang beredar berupa informasi siapa saja yang berhasil duduk menjadi anggota dewan di Kota Depok dalam kompetisi Pemilu Legislatif (Pileg) Tahun 2024 ini.

"Informasi yang beredar di masyarakat belum tentu benar. Saya sendiri mendapat informasi tersebut, namun saya nyatakan ini belum final. Saat ini masih dalam penghitungan di tingkat kecamatan," kata Fathul Arif dalam keterangannya dikutip, Senin (19/2).

Fathul juga mengimbau masyarakat untuk bersabar dan terus memantau setiap pergerakan suara di setiap kecamatan.

"Masyarakat juga bisa terus mengawal dan berpartisipasi aktif dalam pengawasan baik penghitungan dan rekap di tingkat kecamatan masing-masing hingga tingkat kota nantinya," ucapnya.

Fathul juga menambahkan update Minggu (18/2) di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota

Depok sedang melakukan rekap di tingkat kecamatan. Namun, karena SiRekap aplikasi penghitungan dari KPU sedang maintenance atau belum bisa diakses untuk input data, maka saat ini sedang menunggu alat kerja manual dari KPU Depok.

Sebagai informasi, KPU RI menjelaskan dalam hal keterbukaan informasi publik, masyarakat juga bisa memantau rekap hasil formulir C1 baik pemilihan Calon Presiden hingga Calon Anggota DPRD tingkat kota melalui laman resmi KPU di pemilu2024.kpu.go.id.

Lebih lanjut, secara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tepatnya pada pasal 413 ayat 3, tertulis bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Kabupaten/Kota paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah hari pemungutan suara. Ini artinya KPU Depok akan menetapkan secara resmi perolehan suara parpol untuk calon anggota DPRD Kota Depok paling lambat tanggal 5 Maret 2024. ● yan

32 Perpustakaan RPTRA di Jakarta Ditargetkan Dapat Akreditasi

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan 32 perpustakaan yang ada di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta mendapat sertifikat akreditasi dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) pada 2024 ini.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Kadispuip) DKI Jakarta, Firmansyah mengatakan, puluhan perpustakaan di RPTRA itu telah direkomendasikan untuk mendapat sertifikat akreditasi.

"Tahun ini, target ada 32 Perpustakaan RPTRA dari 324 di Jakarta. Untuk 40 perpustakaan sudah terakreditasi," ujar Firmansyah dalam keterangannya, Senin (19/2).

Firmansyah mengatakan, 32 perpustakaan RPTRA yang tersebar di DKI itu direkomendasikan karena telah memenuhi standar nasional perpustakaan (SNP). Setidaknya, ada enam komponen untuk perpustakaan mendapatkan SNP, yakni koleksi buku, sarana prasa-

ra, jenis pelayanan, tenaga atau SDM, penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.

"Ada tiga komponen pendukung. Itu inovasi dan kreativitas, lalu tingkat kegemaran membaca dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)," kata Firmansyah.

Menurut Firmansyah, setiap komponen SNP itu menggambarkan seluruh pencapaian kinerja dari sebuah perpustakaan.

Setelah semua komponen itu dilengkapi, kata Firmansyah, perpustakaan RPTRA wajib merekomendasikan akreditasi. "Kami rutin lakukan pembinaan agar perpustakaan dapat SNP, sebelum direkomendasikan dapat akreditasi," ucap Firmansyah.

Perpusnas nantinya akan menentukan akreditasi A, B, atau C, bagi perpustakaan RPTRA. Masing-masing akreditasi itu memiliki masa berlakunya. Untuk akreditasi A, masa berlakunya lima tahun, B empat tahun dan C tiga tahun. ● yan

Keluhan Pedagang Beras Rawasari, Harga Tinggi, tapi Warnanya Coklat!

JAKARTA (IM) - Sejumlah pedagang Pasar Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, mengeluhkan harga beras yang kian melonjak. Pedagang beras bernama Sri mengatakan, harga sudah naik dari sebelum Pemilu. Beras yang dijualnya adalah pandan wangi seharga 18.000 per kilogram dan campuran seharga 12.000 per kilogram.

"Beras lokal di Indonesia paling murah Rp 15.000. Enggak ada di bawah itu," ucap dia saat bertemu dengan Menteri Perdagangan, Zulkifli "Zulhas" Hasan di Pasar Rawasari, Senin (19/2).

Selain itu, Sri juga mengaku merasa kesulitan dalam proses mendapatkan beras Bulog. Ia telah mengajukan permintaan untuk stok beras Bulog sejak Oktober 2023. Namun, permintaannya selalu ditolak.

"Saya enggak ngerti, harus ini-itu. Saya diminta (mengajukan) pakai empat materi, tapi tetap enggak bisa," lanjut Sri.

Sementara itu, pedagang lain bernama Susi mengeluhkan harga dan kualitas beras yang buruk. Menurut dia, perbandingan harganya adalah jika dulu dia bisa mendapat tiga karung, kini hanya satu karung setengah.

"Semuanya ganti harga. Terus, berasnya coklat enggak bening. Mungkin dioplos, enggak tahu dari sananya bagaimana," ucap Susi.

Saat mendengar keluhan itu, Zulhas berjanji akan segera merapatkan masalah itu. Kepada wartawan, Zulhas menjelaskan bahwa suplai beras lokal premium tidak sebanyak dulu karena belum panen. "Panennya mundur karena di nino. Suplai kurang, harga naik," kata Zulhas.

Menurut dia, hal yang dapat dilakukan adalah untuk mengatur supaya suplai datang tidak lambat.

"Misalkan biasa seminggu baru habis, sekarang dua hari habis. Itu yang harus kami perbaiki," imbuh dia. ● yan

4 | Metropolis

FOTO: ANT



Pemprov DKI Kelola Air Hujan dengan Pendekatan Lingkungan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengembangkan rencana induk (masterplan) ruang terbuka biru (RTB) secara komprehensif salah satunya mengusung implementasi penyediaan ruang simpan air dan RTH multifungsi.

JAKARTA (IM) - Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta mengelola air hujan menggunakan pendekatan lingkungan, yakni dengan memperluas ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka biru (RTB) dalam rangka memperkuat cadangan air.

"Itu yang kita kejar dengan berbagai upayanya, menyeimbangkan ruang terbuka biru dan hijau serta menciptakan ruang terbuka multifungsi hijau biru (creating a

multifunctional blue green public space)," kata Ketua Subkelompok Perencanaan Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Elisabeth Tarigan melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (19/1).

Elisabeth mengatakan RTB diarahkan dapat mengakomodasi empat pilar pengelolaan air di Jakarta, agar air yang mengalir ditahan lebih

lama sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Adapun salah satu subkategori RTB yang menjadi fokus utama penerapan solusi berbasis alam (SBA) adalah pembangunan waduk yang memperhatikan konsep infrastruktur hijau.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengembangkan rencana induk (masterplan) ruang terbuka biru (RTB) secara komprehensif salah satunya mengusung implementasi penyediaan ruang simpan air dan RTH multifungsi.

RTH multifungsi merupakan konsep pengembangan fungsi RTH untuk dapat dimanfaatkan lebih optimal untuk fungsi penyimpanan air sementara atau detensi

terutama saat curah hujan tinggi terjadi.

Sementara itu, dalam upaya peningkatan pengelolaan air di Jakarta, termasuk mitigasi banjir, Deputy Programme Director on Climate, Energy, Cities, and the Ocean World Resources Institute (WRI) Indonesia, Almo Pradana mengatakan melalui kemitraan bersama Dinas SDA DKI Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, dan Cities4Forest mendorong penerapan dan integrasi SBA, serta inventarisasi gas rumah kaca (GRK) melalui pohon, pepohonan, dan RTH.

Menurut dia upaya ini juga untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat, pelestarian alam dan ketangguhan iklim.

"Perlu langkah konkret yang dapat didorong untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) di Jakarta sebesar 50 persen pada 2030, sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon," jelas Almo.

Sebelumnya, WRI Indonesia meluncurkan studi komprehensif SBA tentang mitigasi banjir dan inventarisasi GRK dalam acara "Diskusi Integrasi Solusi Berbasis

AKSI TUNTUT BAWASLU KAWAL PENGHITUNGAN SUARA PEMILU 2024

Massa yang tergabung dalam Gerakan Keadilan Rakyat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Bawaslu RI Jl MH Thamrin Jakarta, Senin (19/2). Mereka mendesak Bawaslu melakukan pengawasan secara maksimal dalam mengawal proses penghitungan suara Pileg dan Pilpres 2024.

Disebut 'Miskin' oleh Lurah Ancol, PPSU Mogok Kerja dan Lempar Sapu

JAKARTA (IM) - Puluhan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Ancol menggelar aksi lempar sapu dan mogok kerja di Jalan Lodan Raya, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Senin (19/2) pagi.

Mereka protes kepada Lurah Kelurahan Ancol, Saud Maruli Manik dan Sekretaris Kelurahan Ancol, Kenny Hutagaol yang diduga sering menghina para petugas PPSU di Kelurahan Ancol dengan sebutan "miskin".

"Saya PPSU Kelurahan Ancol. Kami minta ketegasan dan keadilan. Jadi gini, setiap apel itu Pak Lurah itu selalu memarahi kita, apalagi, yang kita enggak enak hati kan, dengan kata-kata 'miskin'. Contohnya 'PPSU miskin dilarang merokok'," kata Arief, salah satu petugas PPSU yang ditemui dalam aksi tersebut, Senin.

Selain itu, Arief menyebut petugas PPSU kerap "dipecut" saat bertugas oleh Lurah Ancol dan sekretarisnya, terutama saat pelaksanaan Pemilu 2024. "Ya namanya kerja ya capek ya, Bang, cuma jangan dipecut anak-anak, jangan sering kali dipecut. Kemanalagi pas lagi kita menyaksikan pemilu, kami catat berapa suara, itu kan memiliki waktu yang panjang, yang lama. Seharusnya ada rasa simpatinya gitu, jangan terlalu dipecut anak-anak, kasihan," jelas Arief.

Pendapat yang sama juga dilontarkan oleh Pipit Mulyaningsih, anggota PPSU Kelurahan Ancol yang turut dalam aksi itu. "Pak sekretaris kelurahan kalau omong nyakitin, selalu katin miskin ke PPSU. Jadi kayaknya anak-anak sakit hati," ujar Pipit.

Bahkan, perkataan tersebut juga dilontarkan

kepada rekan Pipit saat antre pembagian sembako kecamatan.

"Kalau saya dengar pas pembagian sembako dari kecamatan, itu kan harus nebus Rp 100.000. Sedangkan dia enggak punya duit, tapi dia udah dapat kupon. Tapi dikaitin 'yang miskin miskin ke sini dulu,'" lanjutnya.

Pantauan di lokasi, puluhan petugas PPSU Kelurahan Ancol melempar sapu lidi ke jalan Lodan Raya dekat pintu Tol Ancol Timur. Aksi tersebut adalah tanda bahwa mereka mogok kerja karena merasa kecewa terhadap perkataan Lurah dan Sekretaris Kelurahan Ancol yang kurang berkenan.

Sementara itu, dicoba menghubungi Lurah Kelurahan Ancol Saud Maruli Manik untuk meminta konfirmasi, belum ada respons dari yang bersangkutan. ● yan

Pemprov DKI Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah melakukan upaya antisipasi dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir, angin kencang, tanah longsor. Antara lain dengan menyiapkan posko siaga bencana.

Sebanyak 267 kantor kelurahan yang ada di Jakarta telah mengaktifkan posko siaga bencana sebagai implikasi luhr sebagai manajer penanggulangan bencana menurut Kepgub Nomor 1245 Tahun 2020 tentang Penetapan Luhr sebagai Pengelola Penanggulangan Bencana di Wilayah Kelurahan.

"BPBD DKI Jakarta juga memiliki posko antisipasi bencana di tingkat provinsi yang beroperasi 24 jam yang juga memonitor posko siaga bencana di seluruh wilayah," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangannya, Senin (19/2).

BPBD DKI juga menyiapkan personel gabungan selama 24 jam dari seluruh unsur perangkat daerah.

BPBD DKI Jakarta memiliki 267 petugas penanggulangan bencana atau Tim Reaksi Cepat (TRC) yang bersinergi dengan lebih dari 4 ribu personel pasukan biru milik Dinas Sumber Daya Air dan ribuan personel lain-

alam dalam Strategi Pengelolaan Air dan Penurunan gas Rumah Kaca" di Jakarta pada 12 Februari 2024.

Ada pun studi inventarisasi GRK melalui pohon dan pepohonan kota dilatarbelakangi oleh kebutuhan Jakarta melalui Dinas LH dalam menentukan aksi iklim yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan Jakarta.

Sebagai langkah adaptasi iklim, pohon perkotaan (urban trees) dan pohon di luar kawasan hutan seperti pohon (single tree) atau pepohonan yang berada di jalur hijau, sepadan sungai, taman kota, dan di ruang hijau lainnya berfungsi sebagai penyerap air yang akan mengurangi volume dan kecepatan air yang melimpas, mengurangi potensi banjir, dan mengurangi dampak pencemaran udara.

"Studi yang dilakukan oleh WRI Indonesia menjadi salah satu poin bagi kita untuk meningkatkan inventarisasi emisi gas rumah kaca di DKI Jakarta, khususnya sektor forest and land use (FOLU) karena banyak sekali pohon-pohon di dalam atau sekitar kota, seperti pekarangan rumah, jalur hijau, yang belum masuk dalam perhitungan," ujar Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Helmi Zulhidayat. ● yan



KEMACETAN TERJADI DI SEJUMLAH JALAN JAKARTA
Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (19/2). Kemacetan terjadi di sejumlah jalan di Jakarta setelah kembalinya aktivitas rutin warga se usai liburan panjang akhir pekan lalu dan pelaksanaan Pemilu 2024.

PENGUMUMAN
Telah hilang berupa:
- 1 lembar Invoice asli dengan nomor G-1100-CI-190009733 tertanggal 28 November 2019 atas nama: PT INTI KEBUN MAKMUR untuk 1 unit Volvo Compact Excavator 5.5T EC558 Pro dengan No Chasis/SN/VIN: VCEE55BA00039313; Engine Number: 32719 dan
- 1 lembar Invoice asli dengan nomor G-1100-CI-190009734 tertanggal 28 November 2019 atas nama PT INTI KEBUN MAKMUR untuk 1 unit Volvo Compact Excavator 5.5T EC558 Pro dengan No Chasis/SN/VIN: VCEE55BA00039314; Engine Number: 32720
Jakarta, 20 Februari 2024
Terhadap
PT INTI KEBUN MAKMUR

PENGUMUMAN
Untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dengan ini Likuidator mengumumkan bahwa proses likuidasi dan tindakan pembebasan terhadap YAYASAN DHARMA BHAKTI PARASAHABAT (Dalam Likuidasi), berkedudukan di Jakarta Selatan telah selesai dilakukan dan laporan pertanggungjawaban Likuidator telah disetujui dan diterima sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemisahan No. 5, tanggal 15 Februari 2024, yang dibuat dihadapan RONALDIE CHRISTIE, Sarjana Hukum, Magister Kependidikan, Notaris di Kabupaten Tangerang.
Jakarta, 20 Februari 2024
Likuidator